

BAB I

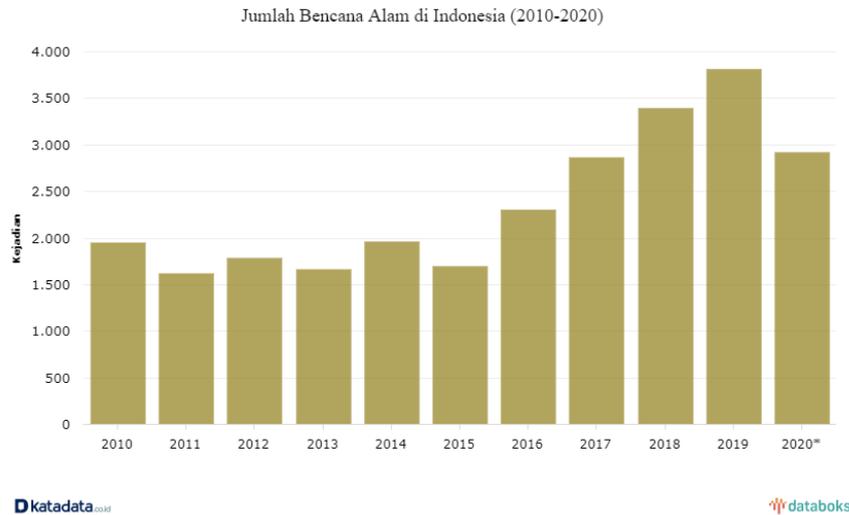
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tata kelola kaltana Srimartani pada masa tanggap darurat covid-19, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap terkait bagaimana pengelolaan kaltana terhadap bencana non-alam seperti pandemi covid-19.

Bencana yang terjadi diwilayah negara Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologi, demografi dan sosiologis yang memungkinkan terjadinya bencana baik bencana alam biasanya sering terjadi gempa bumi yang mana hal tersebut dikonfirmasi bahwasannya indonesia sendiri dilalui oleh *ring of fire* (cincin api), bencana buatan manusia, maupun bencana non-alam. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana sangat beragam diantaranya yaitu adanya korban jiwa, kerusakan alam dan juga kehilangan harta benda serta adanya dampak traumatis/psikologis. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 indonesia sering mengalami bencana gempa, banjir, angin puting beliung, dan juga tanah longsor yang mana semuanya termasuk bencana alam.

Grafik 1. Jumlah Bencana di Indonesia



(Sumber: databooks.katadata.co.id diakses pada 11 Juli 2020 Pukul 20.23

WIB)

Berdasarkan data dari BNPB mencatat tren bencana yang terjadi di Indonesia dari data di atas cenderung meningkat, jumlah bencana yang terjadi secara tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2019, bencana yang melanda Indonesia seperti yang telah disinggung di atas kebanyakan bencana yang disebabkan oleh alam. Namun pada akhir 2019 memasuki tahun 2020 dunia (termasuk Indonesia) dikejutkan dengan virus temuan baru yang sering disebut corona virus, corona virus ini merupakan suatu varian virus yang muncul pertama kali di Wuhan China, dan dalam perkembangannya virus ini menyebar dengan cepat bahkan sampai mencakup skala global, termasuk Indonesia sendiri.

Negara Indonesia mencatat pandemi covid-19 terdeteksi pada bulan Maret 2020 dan setelah itu pandemi ini meluas hingga bisa dikatakan terjadi diseluruh

wilayah indonesia, banyak daerah-daerah yang terjadi lonjakan covid-19 semisal Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sampai wilayah D.I Yoyakarta, bahkan total korban meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 144.088 orang pada akhir tahun 2021 (Kompas, 2021). Berbagai kebijakan bahkan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik kebijakan yang bersifat preventif maupun larangan/himbauan, bahkan kebijakan pembatasan wilayah juga turut dilakukan guna memutus rantai penyebaran covid-19 tersebut. Salah satu kebijakannya yaitu memanfaatkan kembali Kalurahan Tangguh Bencana sebagai garda masyarakat dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Program Kaltana tertuang didalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kalurahan Tangguh Bencana untuk mewujudkan tujuan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana (Ilma Adinata, 2017).

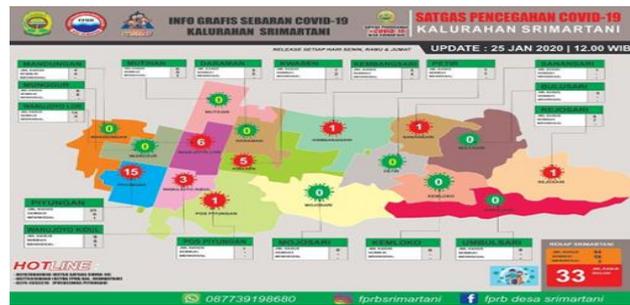
Program Desa/Kalurahan Tangguh Bencana merupakan suatu program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dalam perka BKN Desa/Kalurahan Tangguh Bencana merupakan desa/kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta dapat memulihkan diri dari dampak bencana, mandiri dalam hal ini yaitu masyarakat yang mampu memahami kondisi dan ancaman bencana di wilayahnya serta masyarakat yang dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana melalui sumber daya yang tersedia (Yurita, 2021)

Salah satu kalurahan atau desa yang terkena dampak pandemi covid-19 adalah Kalurahan Srimartani, kalurahan ini berada di wilayah Kapanewon

Piyungan Kabupaten Bantul dan kalurahan ini telah dibentuk sebagai Desa/Kalurahan Tangguh Bencana sejak tahun 2017, rasionalitas dari didirikannya Kalurahan ini masuk ke dalam kategori desa rawan bencana yaitu adanya ancaman bencana multihazard seperti bencana tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sejak Kaltana didirikan banyak sekali bencana yang sering terjadi dikalurahan Srimartani, salah satunya adalah tanah longsor, namun pada tahun 2021 semenjak pandemi covid-19 menyebar luas, bencana tidak hanya datang dari alam namun juga faktor non-alam seperti covid-19 ini. Di kalurahan ini covid menyebar dengan sangat cepat, berdasarkan data sebaran covid yang diberikan oleh FPRB Srimartani pada tanggal 20 Januari 2021 jumlah kasus pasien terkonfirmasi covid-19 adalah sebanyak 79 orang, namun selang beberapa hari terjadi lonjakan positif covid-19 menjadi 94 orang pada tanggal 25 Januari 2021

Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19





(Sumber : Facebook FPRB Srimartani diakses pada 21 Juli 2022 Pukul 21.31 WIB)

Menyikapi penyebaran covid yang relatif cukup cepat di Kalurahan Srimartani, maka FPRB sebagai pelaku pelaksana program Desa Tangguh Bencana dan serta bertindak sesuai dengan komponen Desa Tangguh Bencana yang di dalamnya terdapat aspek penyelenggaraan penanganan bencana, maka dibentuklah dustana sebagai respon FPRB terhadap bencana covid-19, dustana sendiri merupakan program penanganan bencana yang pelaksanaannya dilakukan oleh dusun-dusun di Srimartani serta dimonitori oleh tim Destana dan juga selain menjadi program penyelenggaraan penanganan bencana juga dapat menjadi suatu kegiatan peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi bencana yang tidak tahu kapan akan terjadinya. Diharapkan dalam pelaksanaannya dapat membantu FPRB dalam memutus penyebaran covid-19 di wilayah Kalurahan Srimartani.

1.2 Rumusan Masalah

Covid merupakan suatu bencana yang diakibatkan karena faktor non-alam, covid sangat cepat sekali penyebarannya bahkan hampir diseluruh wilayah indonesia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, salah satu kebijakan yang

dikeluarkan yaitu memanfaatkan kembali Kaltana, Kaltana ini diatur didalam Perka BNPB No. 1 tahun 2012, singkatnya Kaltana ini merupakan suatu program dimana kalurahan harus mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta dapat memulihkan diri dari dampak bencana tersebut. Berdasarkan topik penelitian tersebut, maka rumusan yang akan diteliti adalah : “Bagaimana Tata Kelola Kaltana Kalurahan Srimartani Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui tentang Tata Kelola Kaltana Kalurahan Srimartani Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat secara langsung, maupun tidak langsung, adapun manfaat tersebut adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi tata kelola kebencanaan, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis dikemudian hari

1.4.2 Manfaat Praktis

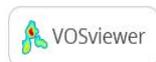
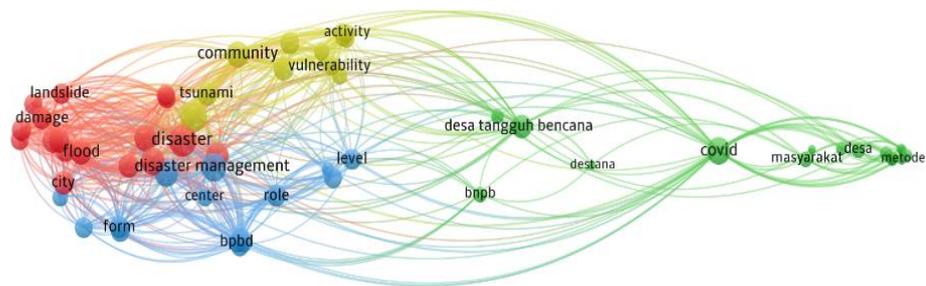
Bagi Pemerintah adalah untuk memberikan masukan dan informasi untuk pemerintah khususnya Kalurahan srimartani dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait tata kelola bencana berbasis non-alam, informasi dan masukan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan

dalam tata kelola kaltana agar menjadi lebih baik dan mampu tercapai semua programnya

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan topik yang akan diteliti, kemudian dari beberapa penelitian tersebut peneliti mengklasifikasikan berdasarkan temanya dan ditemukan sejumlah tema yang akan dijadikan refrensi peneliti dalam menulis, berikut uraian mengenai tinjauan pustakanya;

Gambar. 2 Hasil Pemetaan Topik Penelitian



(Sumber : Vosviewer diakses pada 21 Juli Pukul 08.49 WIB)

Seperti yang telah diketahui banyaknya bencana yang terjadi di indonesia disebabkan salah satunya karena letaknya yang strategis menurut penelitian yang dilakukan oleh (Murdiaty et al., 2020) bahwa indonesia berada di pertemuan 3 lempeng yakni lempeng eurasia, pasifik, dan australia, akibatnya terjadi bencana dengan tingatan yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu

et al., 2021) menyebutkan bahwa bencana yang telah terjadi di Indonesia umumnya terbagi dalam 3 tingkat yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dalam mengidentifikasi bahaya Ruswandi (2008) yang melakukan penelitian mengenai potensi dan tata cara yang tepat dalam proses mitigasinya agar dalam penanganannya berjalan secara efisien dan tepat.

Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh (Indriasari et al., 2015) dan Riyanto Eko, Ahmad Bahtiar Efendi (2020) mengenai analisis dan sistem pengumpulan data bencana alam bahwa mereka menyatakan sangat diperlukannya sistem yang cepat dan akurat dalam menilai suatu ancaman bencana sehingga penanggulangan bencana juga dapat berjalan secara cepat dan efisien, sehingga diperlukannya sistem pengintreasian pengurangan risiko bencana. seperti yang telah diteliti oleh (Fatimahsyam, 2018) dan (Siregar & Wibowo, 2019) sependapat bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting mengingat pengurangan risiko merupakan suatu tanggung jawab bersama antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan saling berkolaborasi (Heril et al., 2022)

Dalam proses penanganan bencana tentu saja harus terdapat tata cara penanganan bencana yang tertuang didalam manajemen kebencanaan, manajemen kebencanaan ini menjadi penting sebab dalam penanganan bencana harus ditangani dengan tepat dan efektif sesuai dengan bencana yang dihadapi, menanggapi hal terkait manajemen bencana yang telah diteliti oleh (Mahardika & Larasati, 2015) (Sari et al., 2020) dan (Rusli & 'Ulya, 2018) mereka sependapat bahwasannya manajemen bencana terbagi dalam beberapa tahapan antara lain

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi atau rekonstruksi yang sering digunakan dalam tahapan manajemen bencana, namun terdapat juga tahapan manajemen bencana yang terbagi menjadi sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana, lebih lanjut mengenai manajemen bencana yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 ini ditemukan bahwa kurang efektifnya penanggulangan pandemi ini disebabkan oleh kurang tepatnya implementasi kebijakan kelembagaan bencana yang bersifat non-alam (S. W. Pratiwi, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Philips & Wicaksono, 2020) & (Faturahman, 2021) Seperti yang telah disinggung bahwa covid merupakan sebuah bencana non-alam dengan karakteristik yang dapat menyebar dengan melalui kontak fisik, air liur, dan udara yang terhirup serta covid ini telah menyebar diseluruh dunia termasuk indonesia, di indonesia sendiri telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait penanganan covid termasuk PSBB dan masih banyak lagi (Hadi, 2020) dari pusat sampai daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh (Andiraharja, 2020) menyebut penanganan yang dilakukan antar satu daerah dengan daerah lain berbeda mengingat adanya desentralisasi dibidang kesehatan, namun tetap sesuai dengan standar penanggulangan covid pemerintah pusat. Desa juga turut berpartisipasi dalam penanganan covid.

Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan desa menurut (Caesaron et al., 2021) (Istiatin et al., 2021) adalah dengan memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pengendalian dan pencegahan covid-19 kepada masyarakat desa, Sebagaimana yang telah diketahui bahwa desa merupakan tatanan dalam

pemerintahan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat yang dalam kewenangannya sangat membantu dalam penanganan covid (Abikusna, 2021) dalam membantu penanganan covid pemerintah mulai memanfaatkan kembali program kalurahan tangguh bencana. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaratih, 2015) desa tangguh bencana merupakan suatu desa yang dapat beradaptasi dan mengenali ancaman bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dalam manajemennya desa tangguh bencana dibagi tahapan antara lain mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Namun dalam pandemi covid seperti sekarang ini manajemen bencana seperti itu dirasa kurang cocok jika diterapkan, Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Oktari, 2019) (Hardy et al., 2020) dan (Raja, 2022), terkait dengan manajemen dan pengimplementasiannya masih banyak yang perlu diperbaiki seperti halnya analisis risiko dan perencanaan dalam penanganan bencana, dan diperlukannya masyarakat yang parsitipatif dalam segala kegiatan program desa/kalurahan tangguh bencana sebagai bentuk peningkatan kapasitas (D. I. Pratiwi & Meirinawati, 2019)

Implementasi desa tangguh bencana dalam penanganan covid masih belum berperan secara aktif, kebanyakan desa baru menyiapkan desa tangguh bencana saat tanggap darurat covid sudah terjadi dengan mengembangkan potensi lokal seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti et al., 2021) dengan pengembangan masyarakat dengan model asset based communities development yaitu dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat, sejalan dengan penelitian ini (Saputra & Mujahiddin, 2021) juga setuju dalam rangka pembentukan desa tangguh bencana

covid-19 diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui metode sociopreneurship dengan memanfaatkan kelompok tani. Dalam menghadapi pandemi seperti sekarang diperlukan inovasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Azqiya et al., 2022) dan (Rahmawati et al., 2021) bahwa dalam menyikapi pandemi covid-19 seperti sekarang ini diperlukan suatu inovasi terkait manajemen kebencanaan berbasis masyarakat yang dapat menjaring partisipasi antar stakeholders dalam merespons pandemi covid-19, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa desa tangguh bencana merupakan inovasi yang akurat dalam merespon bencana ditingkat masyarakat, terlepas daripada hal tersebut desa juga sudah melakukan upaya penanganan pandemi covid seperti dengan membuat satuan tugas (satgas) covid-19 seperti penelitian yang dilakukan oleh (Amin et al., 2020) diteliti bahwa terdapat modal masyarakat dalam pembentukan satgas covid-19 ini antara lain warga, forum pemuda, dan komunitas, program pembentukan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu perencanaan, pelatihan dan penyusunan tupoksi, serta pendampingan dan evaluasi.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Tema	Peneliti	Hasil Temuan
1	Bencana	Ruswandi (2008), Indriasari (2015), Fatimahsyam (2018), Siregar & Wibowo (2019), Musdianty, Rianto & Ahmad	Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya bencana di indonesia karena letak geografis indonesia berada dipertemuan 3

		Bahtiar (2020), Pangestu (2021)	lempeng dunia yaitu eurasia, pasifik, dan australia, dari pertemuan itu menyebabkan gesekan yang mengakibatkan bencana dalam beberapa tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi, bencana juga dibedakan berdasarkan faktornya yaitu alam, sosial, dan non-alam. Para peneliti juga meneliti tentang potensi bahaya serta tata cara bagaimana penanggulangan dengan pengintegrasian sistem penanggulangan sesuai dengan jenis bencananya
2	Tata Kelola Bencana	Mahardika & Larasati (2015), Rusli & Ulya (2018), Sari (2020), Pratiwi (2021), Heril (2020)	Dalam penelitian ini para peneliti menyatakan bahwa tata kelola bencana menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana, sebab tata kelola bencana memiliki tujuan untuk mengurangi serta menanggulangi ancaman bencana baik

			itu sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadi. Dalam tata kelola bencana dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu mitigasi, tanggap bencana, dan rehabilitasi & rekonstruksi. Namun dalam menyikapi pandemi, tata kelola bencana dalam penanganan covid kurang efektif sebab kurang tepatnya implementasi kebijakan kelembagaan bencana yang bersifat non-alam
3	Desa Tangguh Bencana	Kusumaratih (2015), Oktari, Pratiwi & Meirinawati (2019), Phipip & Wicaksono, Faturahman, Hadi, Andiraharja, Hardy, Yuniningsih, Rahmawati, Amin (2020), Caesaron, Istiatin, Abikusna, Hastuti, Saputra & Mujahidin, Rahmawati (2021), Raja, Azqiya, (2022)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan merujuk pada Perka BNPB No.1 Tahun 2012 bahwa desa tangguh bencana merupakan suatu desa yang memiliki kemampuan untuk menganalisis bencana dan menanggulangi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, namun pada masa

			<p>pandemi covid-19 dalam penelitian ini dikatakan bahwa saat terjadinya pandemi covid-19 banyak desa yang baru mendirikan desanya sebagai desa tangguh bencana dengan bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat komunitas, serta partisipatif, dalam menuju desa tangguh bencana melawan covid banyak dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan covid.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijadikan sebagai tinjauan pustaka diatas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa fokus dalam penelitian sebelumnya tentang tata kelola kalurahan tangguh bencana secara umum lebih mengarah pada penanganan bencana yang bersifat alam, adapun terkait dengan penelitian diatas, peneliti akan melakukan hal berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya dengan menambahkan pembaharuan terkait dengan tata kelola bencana yang berupa Tata Kelola Kalurahan Tangguh Bencana Srimartani dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Tata Kelola Bencana

Tata Kelola Bencana atau Pengelolaan Bencana merupakan aktifitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dalam mengendalikan atau mengelola kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengendalian sampai pada tahapan evaluasi serta monitoring (Robert J. Kodoatine dan Roestam Sjarief, 2006:69) dalam (Wirawati, 2015)

Menurut UNESCO dalam (Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2006: 138) mengungkapkan bahwa manajemen atau pengelolaan bencana merupakan kegiatan yang diawali dari pengelolaan jauh sebelum terjadinya bencana, pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Kegiatan pra bencana sampai menjelang bencana merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya efek fatal yang ditimbulkan jika bencana terjadi atau akan terjadi bencana. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pra bencana antara lain mitigasi dan kesiapsiagaan. Ketika terjadi bencana yang menjadi perhatian dalam siklus ini adalah dampak bencana dan tanggap darurat dan respon untuk menyelamatkan korban dan dampak negatif yang ditimbulkan. Terakhir yaitu pasca bencana, dalam kegiatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan, pemulihan merupakan proses yang mana masyarakat dibantu pihak berwenang untuk mengembalikan situasi serta kondisi setelah terjadinya bencana. (Wirawati, 2015)

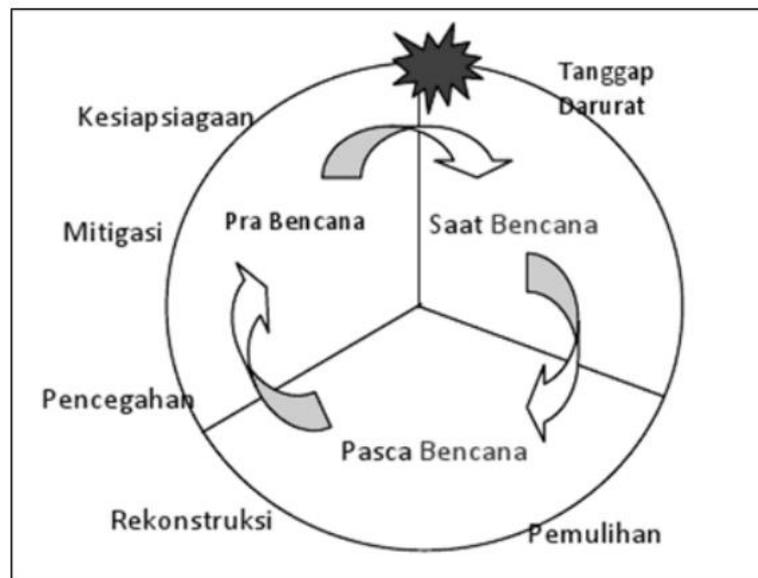
Sedangkan menurut Nick Carter (1991) dalam bukunya yang berjudul *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook* menyebutkan bahwa manajemen atau pengelolaan bencana merupakan suatu rangkaian ilmu pengetahuan terapan atau aplikatif yang mencari dan mengobservasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan yang terkait dengan pencegahan, pengurangan, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan

Secara umum manajemen atau pengelolaan bencana merupakan proses yang dinamis, yang mana meliputi fungsi manajemen klasik. Diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Pada tahap ini pengelolaan bencana atau manajemen bencana banyak melibatkan berbagai macam organisasi yang bekerja sama dalam melakukan proses pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan serta rekonstruksi dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana (Istiqowati, 2018) pengelolaan bencana sendiri sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sehingga pengelolaan bencana dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana.

Dalam konsep pengelolaan atau manajemen bencana terdapat siklus manajemen bencana Chandra (2014) dalam (Faisal N, 2020) menurut Carter dalam bukunya setidaknya dibutuhkan siklus manajemen bencana untuk menghadapi ancaman bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan, Mitigasi, dan

Kesiapsiagaan (Pra-Bencana), Dampak Bencana dan Respons (Tanggap Darurat), dan Pemulihan dan Pengembangan (Pasca Bencana) (Hirnima, 2017)

Gambar 3. Konsep Siklus Manajemen Bencana



(Sumber : (Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Kementerian Kesehatan 2011)

- a. Pra Bencana, Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan ada 3 macam yaitu, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan
 - a) Pencegahan (*Prevention*)

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengukur serta memperkirakan bencana yang akan terjadi. Pada dasarnya tahapan ini sangat sulit untuk di perkirakan dimana dan kapan suatu bencana akan terjadi, akan tetapi kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya bencana.

- b) Mitigasi (*Mitigation*)

Mitigasi merupakan berbagai suatu macam tindakan yang diambil untuk mengurangi kerentanan. Dalam proses

penyelenggaraan mitigasi bencana diperlukan adanya identifikasi mengenai bencana, yaitu tentang bagaimana proses bencana dapat terjadi, hal tersebut sangat diperlukan guna memudahkan para penyusun kebijakan mengenai mitigasi bencana dalam menentukan dan menyesuaikan tindakan apa saja yang perlu dilakukan sebelum-saat-dan pasca bencana terjadi (Istiqowati, 2018)

c) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Gillespe dan Streeter (1987) dalam (Kusumasari, 2014) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai suatu serangkaian tindakan perencanaan, identifikasi sumber daya, pelatihan, serta simulasi sistem peringatan dini yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas respon masyarakat saat terjadinya bencana.

Drabek dan Hoetmar menjelaskan setidaknya terdapat tujuh prinsip kesiapsiagaan yaitu, *Pertama*, Kesiapsiagaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. *Kedua*, kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan selama terjadinya bencana, tujuan daripada kesiapsiagaan yaitu untuk mengurangi dampak bencana dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat. *Ketiga*, Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan, kesiapsiagaan harus disosialisasikan dan dilatih kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diperlukan dan dilakukan saat bencana terjadi. *Keempat*, kesiapsiagaan didasarkan

pada pengetahuan. *Kelima*, kesiapsiagaan menimbulkan aksi yang cepat dan tanggap jika suatu saat terjadi bencana. *Keenam*, kesiapsiagaan memerlukan kepemimpinan dari pejabat publik, dan *ketujuh*, kesiapsiagaan harus direncanakan secara sederhana dan jelas

b. Saat Bencana, pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat atau respons

a) Tanggap Darurat

Pada tahap ini biasanya dapat dilakukan secara cepat dan sesegera mungkin pada saat maupun setelah bencana terjadi, dengan adanya personel dalam lingkungan masyarakat yang sudah terlatih maka diharapkan masyarakat secara mandiri melakukan penanganan dini sebelum bantuan tiba, tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengevakuasi masyarakat terdampak dan menjaga harta benda yang masih tersisa.

c. Pasca Bencana, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi Pemulihan dan Rekonstruksi (Pengembangan)

a) Pemulihan

Perbaikan adalah proses perbaikan yang diutamakan kepada kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana seperti tempat tinggal, sanitasi, lalu kemudian dilanjutkan dengan perbaikan infrastruktur yang mendukung dalam pemulihan sektor ekonomi kepada daerah yang terdampak bencana

b) Pengembangan atau Rekonstruksi

Pada tahap ini dibutuhkan pengembangan simulasi berbagai macam ancaman bencana (alam dan non-alam) yang mungkin menghantam negara, hal ini dilakukan agar kita selalu siap siaga dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi.

1.6.2 Tanggap Darurat Bencana

Ketanggap daruratan didalam kebencanaan bersifat cepat terjadi, segala bentuk bencana ditandai waktu tanggap yang selalu dianggap penting. Kejadiannya selalu berdampingan dengan kenyataan banyaknya “aktor” didalam fase ketanggap daruratan dari yang berasal dari swasta, dari pemerintah, maupun organisasi non- profit koordinasi menjadi hal yang dianggap penting. Koordinasi merupakan faktor penting dan efektif dalam mengurangi jumlah korban, waktu juga suatu hal kritis yang terjadi pada fase tanggap darurat. Maka sistem komando lah pilihan jenis koordinasi yang dianggap paling tepat. Sistem komando merupakan salah satu jenis koordinasi namun dipimpin oleh satu orang agar semua dapat terorganisir dengan baik

Tanggap darurat bencana adalah organisasi penanganan darurat yang secara langsung dipimpin oleh seorang komando tanggap bencana dan dibantu oleh staff komando dan staff umum, serta memiliki struktur organisasi yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas serta memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan lembaga atau organisasi terkait untuk penggerakan sumber daya (Nurrohman, 2022)

Tanggap darurat atau respon merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum, selama, dan segera setelah bencana terjadi dengan tujuan untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, kerusakan harta benda dan kerusakan lingkungan (Kusumasari, 2014). Tujuan daripada dilakukannya kondisi tanggap darurat yaitu pertama, untuk mencegah bertambahnya korban. Kedua, meringankan penderitaan korban dengan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, menstabilkan kondisi korban dan pengungsian. Keempat, mengamankan aset vital yang menjadi hajat banyak hidup masyarakat. Kelima, menyediakan pelayanan dasar pasca darurat. Keenam, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu:

- a. Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Louise K. Comfort (2007) dalam (Liu et al., 2021) pada masa tanggap darurat bencana terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kognisi

Kognisi dalam tanggap darurat bencana berarti kapasitas untuk mengenali tingkat risiko yang muncul di wilayahnya dan mampu bertindak berdasarkan informasi tersebut.

b. Komunikasi

Komunikasi dalam tanggap darurat lebih menekankan pada interoperabilitas penggunaan perangkat seperti radio, HT, dan ponsel seluler untuk bertukar informasi. Dalam praktiknya komunikasi harus melibatkan individu, organisasi, dan masyarakat untuk menyelaraskan tujuan bersama.

c. Koordinasi

Koordinasi berarti menyelaraskan tindakan individu dengan tindakan aktor dan organisasi, serta mampu untuk menjalankan tujuan dan tugas secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang telah disepakati

d. Kontrol

Dalam fokus tanggap darurat kontrol merupakan suatu tindakan untuk menjaga tugas dan fungsi yang telah diberikan serta agar berfokus dalam penyelamatan harta, benda, dan nyawa.

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk

seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).

1.6.3 Kalurahan Tangguh Bencana

Desa/Kalurahan Tangguh Bencana merupakan suatu desa yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri secara cepat dari dampak bencana yang merugikan, dengan demikian desa/kalurahan tangguh bencana secara umum merupakan suatu desa yang memiliki kemampuan untuk mengetahui ancaman di wilayahnya sendiri serta mampu untuk mengorganisir sumber daya masyarakat guna mengurangi kerentanan serta sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana (BNPB, 2012).

Pengembangan desa/kalurahan tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan bentuk atau upaya untuk mengurangi ancaman daripada bencana alam dan kerentanan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Adapun tujuan dari desa/kalurahan tangguh bencana menurut Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam mengurangi risiko bencana

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan memelihara kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberi dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya.

Pada pelaksanaan Program Kalurahan Tangguh Bencana setidaknya harus terdapat minimal peraturan kepala desa yang tidak bertentangan dengan peraturan yang terdapat di atasnya. Secara garis besar Kalurahan Tangguh Bencana terdapat komponen yang setidaknya sebagai berikut :

- a. Legislasi, merupakan penyusunan peraturan desa yang mengatur tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. Perencanaan, merupakan langkah penyusunan rencana penanggulangan bencana desa, rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan rencana aksi pengurangan risiko bencana komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. Kelembagaan, merupakan suatu pembentukan forum penanggulangan bencana desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok atau tim relawan penanggulangan bencana di dusun, rw dan rt, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

- d. Pendanaan, rencana mobilisasi dana dan sumber dana (dari APBD Kabupaten/Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bilamana dibutuhkan)
- e. Pengembangan Kapasitas, melalui pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan serta dapat berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
- f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, merupakan suatu kegiatan mitigasi yang bersifat fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk melakukan tanggap darurat, serta melakukan segala upaya pengurangan risiko bencana melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik struktural maupun non-struktural

Program desa/kalurahan tangguh bencana juga harus mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan kerangka aksi hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan serta kesiapsiagaan tanggap bencana, karena tidak mudah bagi desa/kalurahan untuk langsung mencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut (Yurita, 2021). Dalam Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012 membagi desa/kalurahan tangguh bencana menjadi 3 kriteria

utama, yaitu Desa/Kalurahan Tangguh Bencana Utama, Madya, dan Pratama.

Berikut ini merupakan kriteria desa tangguh bencana beserta ciri-cirinya :

a. Desa Tangguh Bencana Utama

Pada kriteria ini merupakan kriteria desa/kalurahan tangguh bencana yang tertinggi yang dapat dicapai oleh desa yang berpartisipasi dalam program desa/kalurahan tangguh bencana, ciri dari kriteria ini yaitu :

- a) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kalurahan
- b) Adanya dokumentasi perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
- c) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, serta wakil pemerintah desa/kalurahan yang berfungsi dengan aktif
- d) Adanya tim relawan PB Desa/Kalurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- e) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan
- f) Adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

b. Desa Tangguh Bencana Madya

Ciri dari kriteria desa ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kalurahan
- b) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah disusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
- c) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi dengan penuh dan aktif
- d) Adanya tim relawan PB Desa/Kalurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif
- e) Adanya upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, namun belum terlalu teruji
- f) Adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum terujuk dan sistematis

c. Desa Tangguh Bencana Pratama

Pada kriteria ini merupakan kriteria paling awal dalam pembentukan desa tangguh bencana, berikut cirinya :

- a) Adanya upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kalurahan
- b) Adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
- c) Adanya upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil dari masyarakat
- d) Adanya upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kalurahan
- e) Adanya upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan
- f) Adanya upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

1.6.4 Covid-19

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 2019 yang lalu. Terdapat setidaknya dua jenis coronavirus yang telah diketahui dapat menyebabkan gejala yang berat yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS), sedangkan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) merupakan jenis penyakit virus baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia sebelumnya.

Virus Corona merupakan *zoonosis* (semacam virus yang ditularkan antara hewan dan manusia), penelitian menyebutkan bahwa virus SARS ditularkan dari kucing atau luwak ke manusia, sedangkan virus MERS ditularkan dari unta

ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sebab asal muasal terciptanya virus covid-19 masih menjadi misteri, banyak media dan peneliti menduga hewan kelelawar menjadi asal muasal terjadinya virus tersebut (Roring, Mantri, & Lopian, 2021)

Tanda dan gejala umum orang yang telah terinfeksi virus covid antara lain adalah adanya gangguan saluran pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Untuk masa inkubasi rata-rata yaitu 5-6 hari dengan durasi inkubasi terlama selama 14 hari.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Tata Kelola Bencana

Tata Kelola Bencana adalah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk menghilangkan/mengurangi ancaman bencana baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana, dalam tata kelola bencana sendiri terbagi menjadi pra bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana

1.7.2 Tanggap Darurat Bencana

Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan darurat yang secara langsung dipimpin oleh seorang komando tanggap bencana dan dibantu oleh staff komando dan staff umum, serta memiliki struktur organisasi yang menganut satu komando. Serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat bencana terjadi, seperti mendirikan posko, pemenuhan kebutuhan, dan penyelamatan korban dan harta benda.

1.7.3 Kalurahan Tangguh Bencana

Kalurahan Tangguh Bencana merupakan suatu program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri dalam memahami kondisi dan ancaman bencana dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia

1.7.4 Covid-19

Corona virus merupakan wabah virus yang pertama kali muncul dikota Wuhan, China pada akhir 2019, dan kemudian virus ini terus menyebar hampir seluruh dunia. Dampak daripada virus ini mengakibatkan masalah pada berbagai sektor, yaitu ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

1.8 Definisi Operasional

Dalam konteks manajemen bencana, terdapat tiga siklus utama, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. COVID-19, sebagai bencana yang tiba-tiba dan tanpa kesiapan sebelumnya, serta dapat dikategorikan dalam fase tanggap darurat. Peneliti menggunakan teori tanggap darurat bencana Menurut Louise K. Comfort (2007) yang mana dapat membantu dan dikaji mengenai tata kelola kalurahan tangguh bencana.

Tabel. 2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
----	----------	-----------	-----------

1.	Tata Kelola Kaltana dalam Masa Tanggap Darurat Covid- 19	Kognisi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tingkat risiko bahaya pandemi covid-19 - Mengkaji dampak bahaya pandemi covid-19 - Menentukan status kebencanaan pandemi covid-19
		Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menginformasikan kepada Masyarakat terkait bencana covid-19 - Mampu mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan penyebaran covid-19
		Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Satgas Covid-19 - Mendata masyarakat terdampak covid-19 - Bekerjasama dengan Skateholder
		Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelamatan Korban terdampak covid-19 - Pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak covid-19

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan menggunakan teknik deskriptif

analisis. Adapun penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk menafsirkan dari suatu peristiwa yang sedang terjadi, kemudian dari peristiwa tersebut akan dikaji secara mendalam sehingga akan memperoleh suatu makna menurut pandangan dari penelitian (Lena, 2013). Pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian yang mengkaji satu atau lebih kasus tertentu dalam kehidupan nyata dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan laporan-laporan terkait (Creswell, 2013).

Kemudian teknik deskriptif analisis merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggambarkan arti dari data-data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara ataupun observasi, sehingga mendapatkan gambaran umum secara menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya (Widiana, 2016). Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dikarenakan peneliti ingin mencari informasi lebih mendalam mengenai Tata Kelola Kalurahan Tangguh Bencana Srimartani pada masa Tanggap Darurat Covid-19. Dengan menggunakan penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan fenomena yang terjadi sehingga akan memperoleh informasi yang sangat mendalam sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan

1.9.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini mengacu kepada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer akan menggunakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam kepada pihak FPRB selaku pelaksana

program Kaltana Srimartani, Pemerintah Kalurahan Srimartani, dan BPBD Kabupaten Bantul. Data yang akan diambil tentunya suatu data yang berkaitan dengan Tata Kelola Kaltana dalam masa pandemi covid-19.

Kemudian pada data sekunder, peneliti akan menggunakan undang-undang, artikel-artikel atau dokumen terkait lainnya untuk digunakan sebagai referensi dalam menulis penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu kajian yang berkaitan dengan Kaltana, Penanganan Covid-19, Undang-Undang Desa, berita media masa terkait Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Data yang diambil pada artikel yaitu kajian mengenai Kaltana, sehingga dapat mengetahui proses Tata Kelola Kaltana.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan guna untuk bisa menentukan bagaimana cara peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan topik yang akan dikaji. Adapun pada penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara, yaitu wawancara, dan studi dokumentasi :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan interaksi antara pewawancara dengan narasumber mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi untuk memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara yang dilakukan bisa dengan tatap muka secara langsung atau bisa dengan menggunakan via daring (Yusuf, 2014). Dengan proses wawancara, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan

penelitian secara lengkap, fair, dan akurat (Arismunandar, 2013). Proses wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pihak Penyelenggara program Kaltana yaitu FPRB Srimartani dan BPBD Kabupaten Bantul, serta Pemerintahan Kalurahan Srimartani

Tabel. 3 Daftar Informan

Sumber Data	Informan	Jabatan
BPBD Kabupaten Bantul	Budianto	Staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
FPRB Kalurahan Srimartani	Dwi Aprianto	Koordinator Divisi TRC FPRB Kalurahan Srimartani
Pemerintah Kalurahan Srimartani	Isbandiyo	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh orang lain (Al-hamdi Ridho, Sakir, Suswanta, Atmojo M.E, 2020). Dalam pengumpulan datanya penulis akan mengambil dari artikel, website, maupun dokumen pemerintahan yang terkait dengan topik penelitian.

Tabe 4. Data Sekunder

Sumber Data	Data Yang Diperlukan

Dokumen, Undang-Undang, Surat Keputusan dan Artikel Jurnal	Data terkait dengan kebijakan-kebijakan penanganan bencana dan program kalurahan tangguh bencana
Website, Media Massa, dan Portal Berita	Data terkait dengan informasi penanganan bencana pada masa tanggap darurat covid-19

1.9.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan dipilihnya lokasi penelitian dikarenakan Kalurahan ini berada di wilayah zona ancaman bahaya multi hazard artinya bahaya yang menimbulkan bahaya lainnya, dan juga saat pandemi covid-19 terjadi banyaknya mobilitas masyarakat di wilayah kalurahan ini, serta alasan dipilihnya kalurahan ini yaitu karena kalurahan ini pada tahun 2017 ditetapkan menjadi Kalurahan Tangguh Bencana, dan juga pada tahun 2018 mewakili Kabupaten Bantul dalam lomba Kalurahan Tangguh Bencana se-DIY.

1.9.5 Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan bagian yang diobservasikan, dicatat, serta dianggap sebagai data aktivitas individu, kelompok, benda, atau latar belakang sosial sebagai subjek, kemudian memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk dianalisis (Akbar, 2015). Unit analisis adalah bagian dari isi yang akan diteliti lebih lanjut yang kemudian disederhanakan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Srimartani, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan Srimartani.

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dimana disajikan data dalam bentuk kata-kata baik bersumber dari hasil wawancara dan analisis dokumen sehingga hasilnya berupa narasi yang mendalam (Nugrahani, 2014). analisis data merupakan kegiatan setelah data didapatkan dari narasumber dan data lain yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman dalam (Emzir, 2014) proses analisa data kualitatif dilaksanakan dalam tiga kegiatan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan untuk membuang yang tidak perlu, menggolongkan, memfokuskan, dan mengorganisasikan. Proses ini diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul baik dari wawancara maupaun dari studi dokumentasi, yang kemudian dilakukan perangkuman dan kemudian data tersebut dibaca, dan dianalisis kembali. Pada tahap ini kemudian data yang penting serta relevan dengan penelitian ditulis dan yang tidak terpakai dibiarkan saja

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk dari penguraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya, penyajian data ini mendiskripsikan informasi yang telah terkumpul. Dalam penulisan ini, peneliti menampilkan data dalam bentuk deskripsi atau cerita dari para narasumber yang didukung dengan data sekunder. Penyajian data dalam

penulisan ini disajikan dalam bentuk deskripsi dengan didukung tabel dan gambar

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan penggalian esensi dan penyajian informasi sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada proses penarikan kesimpulan, peneliti melakukan analisis terhadap setiap indikator penelitian, setelah dilakukan analisis kemudian peneliti mengerucutkan hasil analisis tersebut dan ditulis kembali sehingga didapat kesimpulan yang valid berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.